

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan – Requisitoir)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bagir Manan. 2003. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Waluyo. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso. 2009. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Cet. Ketiga. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Harun Alrasid. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Harun M. Husen. 1994. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- HMA Kuffal. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Cetakan I, Citra Aditya Bhakti.
- L & J Law Firm. 2009. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Cet. Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- . 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengaduan Hukum. Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia.
- Martiman Projohamindjoyo. 2001. *Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)*. Jakarta: Simplek.
- Marwan Effendy. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofis Hukum Acara Pidana*, Cet. Pertama. Jakarta: Grasindo.

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nanda Agung Dewantara. 2000. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Askara Persada Indonesia.
- OC. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Tersangsa, Terdakwa Dalam Penyelidikan*. Bandung: Alumni.
- PAF. Lamintang. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sinar Baru
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 2003. *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*. Bandung: Sinar Grafika.
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perpektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Binacipta.
- 2004. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Said Sampara dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Soerdjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharto RM. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Usep Ranawijaya. 2003. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia.
- WJS. Poerwasunata. 2003. *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiryo Prodjodikoro. 1990. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Simanjuntak.
- Yan Pramudya Puspa. 2002. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Zaenuddin Ali. 2017. *Hukum Islam*. Bandung: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal/Artikel Internet

- Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420
- Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).
- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11:07 WIB
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 20:10 WIB
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhammad Farhat Abbas. Disertasi. “*Pengisian Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945*”. Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Bandung, 2013.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Tim, “Eksekusi Akhir Penyelesaian Perkara”, diakses melalui <https://pt-bandung.go.id/eksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>.